

TERKAIT PENGANIAYAAN SANTRI

V dan E Hanya Melerai Keributan di Kafe

YOGYA (KR) - Dua dari tujuh tersangka kasus penganiayaan dan penusukan dua santri, V dan E menyatakan hanya terseret dalam peristiwa pada Rabu (23/10) malam dan tidak ada di TKP. Kejadian sebenarnya, sehari sebelumnya saat berada di Cafe area jalan Prawirotaman Yogyakarta, Selasa (22/10) malam, V dan E melihat keributan tanpa tahu antar siapa dan berusaha melerai.

"Namun, setelah melerai datang tiga orang mengendari sepeda motor salah satunya membawa senjata tajam. Saat bersamaan V melihat seseorang membawa sajam berjalan ke arah E dan akan melayangkan sajam tersebut. V bermak-

sud menahan orang tersebut dan terjadi perebutan sajam," tutur Penasihat Hukum E dan V Hariyanto SH, Rabu (30/10).

Akibatnya V terkena sajam dibagian jari tangannya. "Setelah berhasil mengamankan sajam tersebut, klien kami V menyuruh teman-temannya untuk pulang. Namun V masih diselimuti rasa marah, sehingga membanting sajam tersebut di meja hingga terjadi kerusakan. Sebagai korban V yang terluka kemudian melapor ke polisi dengan No LP/B/484/X/2024/SPKT/Polresta Yogyakarta/Polda DIY tertanggal 23 Oktober 2024," jelasnya

Diakui berita yang menyebutkan dua

kiennya (E dan V) ikut terlibat dalam penusukan santri di Prawirotaman pada Rabu (23/10) dan ditampilkan pada press release Polresta Yogyakarta Selasa (29/10) harus diluruskan. "Saat kejadian penusukan santri pada Rabu (23/10), klien kami E dan V sedang berada di rumah dan tidak ada di lokasi kejadian," tandas Hariyanto

V dan E, justru mengetahui dari berita-berita di media sosial. "Selaku penasihat hukum klien kami memohon maaf terkait kegaduhan yang ada. Kami coba meluruskan kejadian yang sebenarnya, klien kami tidak ikut terlibat karena banyak orang berspekulasi dengan membawa suku," pungkas Hariyanto.

(Vin)-f

Anies

Dalam konferensi pers yang berlangsung Selasa (29/10) malam, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menegaskan bahwa tidak ada unsur politisasi dalam penetapan TTL sebagai tersangka. Karena itu ia secara tegas menyatakan bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti. "Jadi, tidak terkecuali bukti pun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," katanya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengaku turut berse-dih terhadap Tom Lembong yang ditetap-

Tanpa

Penjelasan tersebut merupakan pandangan DPR untuk Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, 87/PUU-XXII/2024, dan 101/PUU-XXII/2024. Ketiga perkara itu menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur ambang batas pengusulan capres dan cawapres.

Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Erika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna yang seluruhnya merupakan mahasiswa. Dalam petitum-

Pindad

Prasetyo Hadi mengakui, belum ada keputusan siapa saja jajaran pemerintahan yang akan menggunakan mobil dinas Maung. Menurutnya hal itu juga menyesuaikan kapasitas produksi. "Doakan saja biar Pindad bisa segera produksi kualitas yang baik," kata Prasetyo.

Dikatakan, mobil dinas Maung akan menggunakan skema beli bukan sewa, sehingga kendaraan dinas itu akan men-

kan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula. "Saya turut bersedih sebenarnya. Semo-ga Pak Tom sabar mudah-mudahan ku-at," kata Muhaimin.

Saat ditanya lebih lanjut soal indikasi kriminalisasi dari tim oposisi, Muhaimin mengaku tidak mengetahuinya. "Saya enggak tahu," kilahnya.

Sementara Mantan calon presiden Anies Rasyid Baswedan percaya bahwa proses peradilan terkait Tom Lembong akan berjalan secara transparan. "Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan

nya, mereka meminta MK untuk menyatak-an Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024 diajukan oleh empat orang dosen, yaitu Dian Fitri Sabrina, Prof. Muhammad, S. Muchtadin Al Attas, dan Muhammad Saad. Keempat pemohon tersebut meminta agar Pasal 222 UU Pemilu diubah menjadi: pasangan calon presiden dan wakil presi-

jadi investasi negara. Sedangkan mengenai akan diapakan kendaraan dinas lama menteri yang sudah digunakan saat ini, akan dipikirkan beriringan nanti. "Ya nanti. Kan nanti begitu ada, itu kita pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa," jelasnya.

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengatakan, pihaknya sanggup memproduksi Maung untuk digunakan sebagai kendaraan operasi-

memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom," kata Anies melalui akun X resminya, @aniesbaswedan, seperti dikutip di Jakarta.

Anies mengaku terkejut mendapat kabar ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Walau begitu, proses hukum tetap harus dihormati. "Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan UUD 1945 masih valid, yaitu 'Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat)', bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)," ujarnya.

Sambungan hal 1

den diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR, selama tidak melebihi persentase tertinggi partai politik pemenang pemilu.

Adapun, Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay dan pegiat kepe-miluan TiTi Anggraini.

Sambungan hal 1

nal para menteri sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus sanggup karena pasti fasilitas, infrastruktur dukungan pasti akan disiapkan. Secara prinsip memang Pindad sudah memulai dan hasilnya sudah ada dan digunakan," kata Mose.

Mose belum menjelaskan berapa unit Maung yang disiapkan pihaknya untuk dipakai jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

(Ant/San)-d

The Chilean

pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% (yoy).

Dibalik tingginya angka pertumbuhan ekonomi DIY, terdapat tantangan sosial ekonomi yang mendasar di DIY. Disparitas sosial ekonomi antar daerah 'Utara-Selatan' di DIY masih relatif lebar. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang terkonsentrasi di wilayah Selatan DIY. Sementara tingkat ketimpangan ekonomi DIY, yang tercermin dari rasio gini, pada tahun 2024 masih relatif tinggi mencapai 0,43.

Dari sisi perkembangan inflasi, DIY tercatat mengalami lima kali deflasi selama tahun 2024. Deflasi terkini terjadi pada bulan September 2024 sebesar 0,10% (mtm) (BPS, 2024). Deflasi yang terjadi di DIY selama tahun 2024 terutama disebabkan penurunan harga komoditas bahan pangan seiring pasokan yang melimpah yang dihasilkan dari internal DIY maupun daerah sentra produksi lain di luar DIY. Kondisi deflasi tersebut tentunya perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan disinsentif bagi pelaku usaha pertanian.

Potensi kerawanan lain dalam ekonomi DIY timbul dari sektor Pariwisata. Kemudahan akses mobilitas masyarakat dapat menjadi paradoks apabila tidak dikelola dengan tepat. Salah satu cermi-

nan paradoks tersebut terlihat dari penurunan rata-rata lama menginap wisatawan di DIY yang sebesar 1,5 malam pada Agustus 2024, lebih rendah dari Agustus 2023 yang mencapai 2 malam (BPS, 2024). Potensi disinsentif pertanian dan penurunan kinerja pariwisata apabila tidak diantisipasi maka dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan memicu ketimpangan yang semakin lebar serta menyebabkan gejolak dalam stabilitas sosial ekonomi DIY.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, diperlukan upaya sinergi yang dapat memberikan nilai tambah secara simultan dalam perekonomian DIY. Pengembangan agrowisata dan agroindustri dapat dipertimbangkan untuk menjadi solusinya. Terdapat banyak lokasi yang telah mengembangkan agrowisata dan agroindustri, salah satu contohnya desa Wukirsari, Kabupaten Bantul yang menjadi salah satu juara Desa Wisata Maju Anugerah Desa Wisata Indonesia (AD-WI) 2023.

Upaya tersebut dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah untuk pariwisata dan hilirisasi pangan yang harapannya dapat menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Secara lebih luas, strategi ini berpotensi menyerap

pelaku UMKM berpendapat bahwa meskipun tanpa akuntansi, perusahaan tetap berjalan lancar dan mendapatkan laba. Banyak pemilik usaha kecil dan menengah merasa bahwa usahanya masih berjalan dengan baik, tetapi sebenarnya tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Saat disurvei, banyak pemilik usaha tidak bisa memberitahu berapa jumlah laba yang didapat setiap periode, melainkan lebih menonjolkan aset yang dimiliki seperti tanah, rumah, atau kendaraan. Selain dari keuntungan usaha, aset juga bisa diperoleh dari harta pribadi. Aset yang dimiliki tidak digunakan untuk bisnis, melainkan untuk keperluan pribadi. Tidak ada pencatatan pemilik usaha bisa menjalankan bisnis dengan baik. Beberapa

tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Pada intinya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi hingga masyarakat untuk mengantisipasi "The Chilean Paradox" sehingga tercipta diversifikasi ekonomi yang tahan guncangan dan inklusif. Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah diperlukan untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi baru dan redistribusi ekonomi.

Pelaku usaha harus berinovasi dan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing. Sementara masyarakat perlu mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan kompetensi. Berbagai peranan tersebut perlu dilandasi dengan kajian dan analisis mendalam dari akademisi sehingga kebijakan dan keputusan yang dilakukan memiliki dasar yang kuat, terarah dan efektif (research-based policy). Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, diharapkan DIY dapat mengatasi berbagai tantangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. □ -d

(Penulis, Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Provinsi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY dan Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta)

Sambungan hal 1

Akuntansi untuk UMKM



USAHA kecil mikro dan menengah (UMKM) sangat penting dalam meningkatkan ekonomi Indonesia. Namun, UMKM sering mengalami kesulitan karena pengelolaan keuangan yang kurang teratur. Karena itu, UMKM perlu menggunakan akuntansi agar pemilik usaha bisa menjalankan bisnis dengan baik. Beberapa

pelaku UMKM berpendapat bahwa meskipun tanpa akuntansi, perusahaan tetap berjalan lancar dan mendapatkan laba. Banyak pemilik usaha kecil dan menengah merasa bahwa usahanya masih berjalan dengan baik, tetapi sebenarnya tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Saat disurvei, banyak pemilik usaha tidak bisa memberitahu berapa jumlah laba yang didapat setiap periode, melainkan lebih menonjolkan aset yang dimiliki seperti tanah, rumah, atau kendaraan. Selain dari keuntungan usaha, aset juga bisa diperoleh dari harta pribadi. Aset yang dimiliki tidak digunakan untuk bisnis, melainkan untuk keperluan pribadi. Tidak ada pencatatan pemilik usaha bisa menjalankan bisnis dengan baik. Beberapa

untuk bisnis. Hal ini membuat sulit untuk mengetahui perkembangan keuangan dari usaha terutama dalam hal kinerja secara jelas. Pelaku UMKM belum menerapkan akuntansi umum karena dianggap sulit dan tidak penting. Sebagian besar pelaku UMKM merasa sulit menggunakan akuntansi dalam bisnis mereka. Pembukuan keuangan adalah proses mencatat semua transaksi keuangan selama berjalannya usaha. Tujuan membuat catatan keuangan adalah untuk menyimpan semua transaksi secara rapi dan teratur. Manfaat Pencatatan Keuangan pada bisnis

sebagai alat penilaian dan arsip dokumen mengenai semua jenis pembayaran. Selain itu, pembukuan juga berfungsi sebagai alat kontrol aliran uang masuk dan keluar serta alokasi modal dan dana untuk kelangsungan usaha. Dengan melakukan pembukuan, risiko kehilangan produk, asset, uang, dan kecurangan dapat dikurangi. Pembukuan ini penting untuk menilai apakah usaha layak dipertahankan atau tidak. Usaha yang sukses adalah yang teratur dalam mencatat transaksi keuangannya.

Apa yang harus disediakan dalam mencatat pembukuan :

1. Pencatatan Persediaan, pencatatan ini sangat berguna untuk menjaga aset agar tetap teratur dan terkontrol. Catatan dalam buku ini berisi daftar

barang atau aset yang telah dibeli dan dimiliki untuk mencegah adanya penipuan. 2. Pencatatan Kas, adalah catatan tentang uang masuk dan keluar untuk membantu mengontrol keuangan bisnis, menetapkan target penjualan, modal usaha, dan mengatur biaya. 3. Pencatatan Inventaris, adalah daftar asset milik perusahaan. Tujuan pembukuan ini adalah untuk membantu perusahaan dalam menjaga dan mengendalikan aset-asetnya. Keuntungan lain dari mencatat inventaris adalah memudahkan pengawasan aset, mempermudah pemeriksaan barang, memudahkan perpindahan atau penghapusan barang, dan memberikan bukti tertulis tentang pengelolaan barang.

Prosedur untuk membuat catatan keuangan 1. Membuat Buku Kas Pengeluaran, Pembukuan ini untuk mencatat semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menjalankan usaha, membayar gaji dan pengeluaran lain yang dibutuhkan dalam mendukung usaha tersebut. 2. Membuat Buku Kas Pemasukan, Pembukuan ini untuk mencatat semua pemasukan dari transaksi penjualan yang bertujuan untuk mengetahui besar keuntungan atau kerugian dari usaha yang dijalankan. Meskipun semua dunia usaha dan pengusaha pasti menginginkan pencatatan keuangan berjalan dan berfungsi dengan baik, akan tetapi saat ini masih banyak dunia usaha yang mengalami kesulitan dalam

menjalankan pengelolaan bidang keuangan agar berfungsi dengan baik. Namun karena akuntansi memiliki banyak manfaat, maka mulai saat ini pengusaha wajib melakukan pencatatan akuntansi. Secara keseluruhan, pencatatan keuangan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan alat strategis yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mengelola bisnisnya dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang akurat tentang keuangan, maka UMKM dapat menghadapi tantangan bisnis dengan lebih percaya diri dan membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Semoga bermanfaat.

MOU KADIN DIY-BPSDMI KEMENPERIN

Komitmen Tingkatkan Daya Saing-Keterampilan



KR-Istimewa

Robby Kusumaharta dan Masrokhhan dalam acara penandatanganan MoU.

ja sama ini merupakan bentuk komitmen Kadin DIY dalam memperkuat kolaborasi, terutama dengan dunia pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menjawab kebutuhan industri yang kian dinamis. "Kami berharap, melalui sinergi ini semakin banyak tenaga kerja DIY yang terampil, sehingga mampu menghadapi tantangan industri global sekaligus berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah," terang Robby.

Masrokhhan berharap Kadin DIY dan BPSDMI terus berkomitmen dalam mendukung program-program pengembangan SDM. Hal itu penting untuk mencapai visi industri yang maju, inovatif, dan berkelanjutan di DIY. "Dengan adanya program pelatihan vokasi ini, diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang siap pakai dan sesuai dengan standar kebutuhan industri," imbuh Masrokhhan.

(Ria)-f

Sultan HB X

"Setiap kegiatan peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam diktum kedua diinstruksikan ketegasan kepada bupati dan walikota, hingga diktum terakhir," ungkapnya.

Beny menjelaskan, dalam diktum kedelapan yang tercantum dalam Ingub tersebut setiap bupati dan walikota diharuskan untuk melaporkan pelaksanaan instruksi tersebut paling lambat 15 hari kerja. Instruksi Gubernur berlaku mulai 30 Oktober 2024, dan telah disampaikan kepada bupati, walikota, serta Dewan Perwakilan Rakyat

Sambungan hal 1

Daerah (DPRD) melalui Sekretariat DPRD. Selain itu, instruksi tersebut juga ditembuskan kepada Kementerian Perdagangan untuk memastikan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. "Soal batas waktu pembuatan ketentuan laporan pelaksanaan instruksi harus sudah diterima dalam waktu 15 hari. Dengan langkah itu Pemerintah berharap dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi prinsipnya, bupati dan walikota wajib melaksanakan Instruksi Gubernur itu," papar Beny.

(Ria)-d

Hari Ini,

Sambungan hal 1

"Ada sejumlah hal yang membuat pekerja tidak diuntungkan, seperti memberikan kemudahan kepada pemberi kerja dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal di regulasi sebelumnya ada mekanisme yang dilakukan agar pekerja dapat dirumahkan.

Selain itu ada kompensasi pesangon, kemudahan memberikan kemudahan bagi pekerja kontrak dan pekerja alih daya (outsourcing). Lalu memberikan kemudahan kepada pekerja asing mendapatkan pekerjaan serta pemberi kerja cenderung memberikan upah yang tidak layak kepada pekerja.

Ini yang coba kami mohon agar di *judicial review* kembali oleh majelis hakim," ujar Abdullah.

Ditambahkan, UU Cipta Kerja ini juga memberikan kemerdekaan kepada pengusaha mulai dari penggunaan tenaga kerja fleksibel dengan upah murah hingga kemudahan melakukan PHK kepada buruh. Dalam kondisi tersebut, Gekanas meminta agar MK untuk membatalkan dan mencabut klaster ketenagakerjaan di UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

(Ant/Has)-f

Fokus

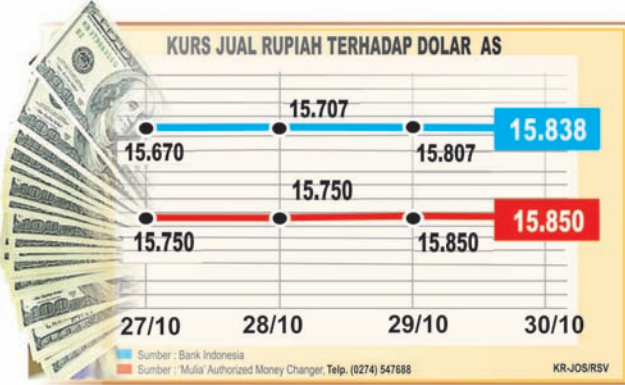
Sambungan hal 1

menjadi sistem yang berkeadilan serta berfokus pada mutu dan kesejahteraan guru.

Lalu persoalan guru juga disoroti oleh Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Organisasi itu mengingatkan mengenai pentingnya pemerataan guru berkualitas di Indonesia serta pemenuhan hak guru untuk berkembang secara profesional dan terjamin kesejahteraannya.

Selain mendorong perbaikan tata kelola guru, Komisi X DPR RI juga mendorong pelaksanaan amanat konstitusi sebagai dasar dalam mengurai dan menyelesaikan masalah pendidikan yang kompleks melalui revisi Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

"Komisi X juga mendorong perbaikan mutu LPTK secara



Prakiraan Cuaca 31 Oktober 2024					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dimi Hari	Suhu C
Bantul					22-30
Sleman					22-29
Wates					22-29
Wonosari					22-30
Yogyakarta					22-30
Cerah					Berawan
Udara Kabur					Hujan Lokal
					Hujan Pelir

Grafis: Arko